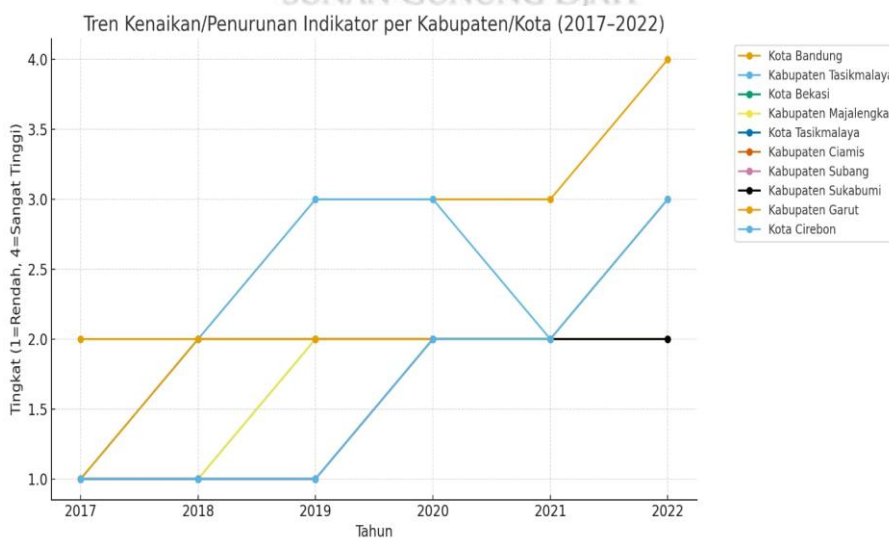


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas dan konflik merupakan fenomena sosial yang selalu dihindari baik oleh negara maupun masyarakat, karena keberadaannya dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kedua permasalahan tersebut justru menunjukkan kecenderungan yang semakin menakutkan, termasuk di wilayah Jawa Barat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di tanah air, menghadapi tantangan serius dalam pengendalian kejahatan dan potensi konflik sosial. Tingginya angka kejahatan tersebut secara langsung menimbulkan keresahan dan rasa takut di kalangan masyarakat, yang berimplikasi pada menurunnya rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Situasi ini menegaskan mendesaknya perlunya langkah-langkah strategis dari aparat penegak hukum dan petugas keamanan setempat, tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum yang represif, tetapi juga melalui upaya preventif dan kolaboratif untuk meminimalisir potensi konflik serta menekan laju kriminalitas di wilayah Jawa Barat.

Gambar 1. 1 Heatmap Potensi Kenaikan Konflik Jawa Barat



Sumber : Open Data Jabar 2023
(Data Diolah Peneliti 2025)

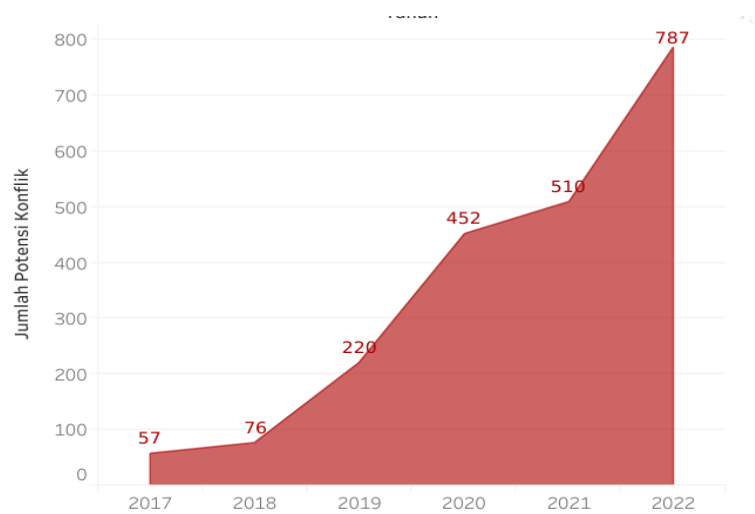
Berdasarkan tren kenaikan dan penurunan indikator potensi konflik pada periode 2017–2022, terlihat bahwa setiap kabupaten/kota menunjukkan dinamika yang berbeda sesuai dengan karakter sosial dan kondisi wilayahnya. Kota Bandung tampak mengalami peningkatan yang konsisten hingga mencapai kategori sangat tinggi pada tahun 2022, yang mengindikasikan adanya tekanan sosial dan politik yang semakin menguat seiring perkembangan perkotaan. Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Cirebon juga menunjukkan tren peningkatan, terutama setelah tahun 2019, yang menggambarkan adanya intensifikasi interaksi sosial yang berpotensi memicu terjadinya kejadian serupa. Sementara itu, wilayah seperti Kota Bekasi, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sukabumi cenderung berada pada tingkat yang stabil, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan sosial dan kontrol komunitas relatif berjalan efektif. Peningkatan indikator di beberapa daerah setelah tahun 2020 dapat dikaitkan dengan dampak sosial-ekonomi pascapandemi, terutama terkait distribusi bantuan, pemulihan ekonomi, dan penyesuaian kembali aktivitas masyarakat. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa potensi konflik tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi struktural wilayah, tetapi juga oleh dinamika kebijakan dan situasi sosial yang berkembang setiap tahunnya.

Potensi kenaikan konflik, eskalasi potensi konflik di Jawa Barat akhir-akhir ini terus bertumbuh, baik dari sisi jumlah maupun tingkat keparahannya. Konflik dalam masyarakat bukanlah fenomena tunggal, melainkan proses sosial yang berkembang ketika terjadi kesinambungan dalam hubungan sosial, distribusi sumber daya, maupun perbedaan kepentingan di antara kelompok. Definisi ini menunjukkan bahwa konflik pada dasarnya lahir dari ketidakselarasan interaksi, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan terbuka atau ketidakstabilan sosial. Peningkatan potensi konflik ini berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Ketidakamanan yang timbul dari potensi konflik, baik yang berbasis antar masyarakat, antar kelompok kepentingan, atau akibat ketidakpuasan sosial ekonomi, dapat memicu rasa takut, khawatir, dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan akibat lajur urbanisasi dan migrasi ke beberapa Kota atau Kabupaten membawa dampak langsung terhadap

peningkatan kepadatan organisasi, tekanan terhadap ketersediaan infrastruktur publik, serta munculnya beragam permasalahan sosial. Dinamika itulah yang kerap menjadi salah satu faktor meningkatnya kerawanan tindak kriminalitas. Dimana urbanisasi tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberagaman sosial, tetapi juga melahirkan tantangan dalam pemeliharaan keamanan masyarakat yang memerlukan intervensi

Gambar 1. 2 Grafik Kenaikan Kasus Kriminalitas di Jawa Barat



Sumber : Open Data Jabar, 2023

Berdasarkan data diatas, jumlah Kenaikan Kasus Kriminalitas di Jawa Barat menunjukkan kenaikan sejak tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2017, kasus yang tercatat sebanyak 57, kemudian mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 76 kasus pada tahun 2018, 220 kasus pada tahun 2019, hingga melonjak signifikan menjadi 452 kasus di tahun 2020. Peningkatan ini terus berlanjut, di mana tahun 2021 tercatat 510 kasus dan pada tahun 2022 mencapai 787 kasus. Lonjakan lebih dari 50% antara tahun 2021 hingga 2022 menandakan bahwa eskalasi konflik semakin kompleks dan hampir merata di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat. Data ini mengindikasikan bahwa permasalahan keamanan dan ketertiban di Jawa Barat semakin menantang.

Polri memiliki mandat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang memelihara keamanan dan kesejahteraan masyarakat

sekaligus menjaga stabilitas nasional. Fungsi ini menunjukkan bahwa Polri tidak semata hadir dalam hal nya penegakan hukum, namun juga berperan sebagai institusi sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehari-hari. Keberadaan Polri dapat dipahami sebagai bentuk *aparatur negara* yang menghubungkan negara dengan kebutuhan dasar warga negara akan rasa aman, sehingga setiap tindakan kepolisian memiliki dimensi politik, hukum, dan sosial sekaligus Santosa (2019).

Pelaksanaan patroli kepolisian tidak dilakukan secara terpisah, tetapi didasarkan pada kebijakan yang berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah. Mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aturan teknis patroli di lingkungan Polri, hingga pelaksanaannya di daerah melalui program patroli yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Di Kabupaten Bandung, kebijakan tersebut diwujudkan melalui program Tim Sijalak Presisi oleh Polresta Bandung. Untuk memperjelas hal tersebut, berikut disajikan tabel derivasi kebijakan patroli dari tingkat nasional hingga implementasi daerah.

Tabel 1. 1 Rangkaian Kebijakan Patroli sebagai Dasar Tim Sijalak Presisi

Kebijakan	Fokus
UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan 14 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dasar Tugas Polri Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Perkabarkam No. 4 Tahun 2015 tentang Patroli	Pedoman patroli Polri
Kebijakan Baharkam Polri 2017	Penguatan patroli berbasis Preventif
Sprin Kapolresta Bandung No. Sprin/561/XII/Satsamapta	Dasar Tim Sijalak Presisi

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa Polri bertugas melindungi, mengayomi, dan mengabdikan pada masyarakat, selain juga menegakkan hukum. Tugas pokok Polri tidak hanya dalam bingkai legal-formal, tetapi juga dalam kerangka responsivitas terhadap dinamika masyarakat modern yang menangani ancaman baru seperti kejahatan transnasional, konflik horizontal, hingga tindak kriminal berbasis teknologi Supriyanto (2020). Dengan

demikian, peran Polri tidak dapat dianggap sekadar sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai aktor kunci dalam tata kelola keamanan publik yang menuntut pendekatan preventif, humanis, dan kolaboratif.

Dalam rangka mengoperasionalkan fungsi preventif tersebut secara terstruktur dan akuntabel, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan kerangka regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan patroli. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabarkhakam) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Patroli, yang kemudian diperbarui dan diperkuat melalui kebijakan Barkhakam pada tahun 2017, menjadi landasan normatif utama yang mengatur tata cara, prosedur, sasaran, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan patroli oleh seluruh satuan kewilayahan Polri. Regulasi ini merupakan penjabaran teknis dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam hal pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat preventif.

Perkabarkhakam tentang Patroli secara substantif mendefinisikan patroli sebagai salah satu kegiatan Kepolisian yang dilaksanakan dengan cara berkeliling atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah hukum tertentu, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membangun kehadiran negara yang nyata di tengah kehidupan sosial warga. Melalui regulasi ini, patroli tidak lagi dipandang sebatas aktivitas rutin administratif semata, melainkan ditempatkan sebagai instrumen strategis pencegahan kejahatan yang terencana, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.

Perkabarkhakam tentang Patroli mengklasifikasikan jenis-jenis patroli berdasarkan moda pelaksanaannya, yang meliputi patroli jalan kaki, patroli menggunakan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, patroli perairan, serta patroli udara bagi satuan yang memiliki kesiapan alutsista. Klasifikasi ini mencerminkan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik geografis dan demografis wilayah hukum masing-masing satuan. Regulasi ini

turut menekankan pentingnya dimensi hubungan kemasyarakatan dalam setiap pelaksanaan patroli.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah yang berdampingan langsung dengan Kota Bandung dengan kondisi wilayah tertinggi potensi konflik berdasarkan data diatas sekaligus penyangga utama di Provinsi Jawa Barat. Hal berarti Kabupaten Bandung memiliki peran yang strategis dalam perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di kawasan Bandung Raya. Posisi ini menjadikan Kabupaten Bandung tidak hanya berfungsi sebagai daerah perumahan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas industri, perdagangan, serta kawasan pendidikan yang terus berkembang. Namun demikian, di balik peran strategi tersebut, Kabupaten Bandung juga menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjaga masyarakat.

Dalam rangka menekan angka kriminalitas, Polresta Bandung melaksanakan program patroli rutin melalui Tim Sijalak Presisi yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Bandung Nomor: Sprin/561/XII/2025/Satsamapta. Program ini dirancang untuk memperkuat kehadiran polisi di titik-titik rawan kejahatan, serta memberikan rasa aman, nyaman dan perlindungan langsung kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, arah pelaksanaan tugas Tim Sijalak Presisi tidak hanya berpijak pada aspek operasional semata, melainkan juga pada kerangka visi dan misi yang jelas. Visi tim ini adalah menjadi tim kepolisian yang profesional, responsif, dan humanis dalam menjaga harkamtibmas demi terciptanya Kabupaten Bandung yang aman, tertib, dan kondusif. Visi tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama tidak hanya terfokus pada angka penindakan, melainkan juga pada kualitas pelayanan keamanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Misi Tim Sijalak Presisi kemudian memperkuat kunjungan tersebut melalui beberapa operasional strategis. Pertama, melaksanakan patroli preventif maupun represif, tidak hanya untuk mendeteksi kejahatan yang terjadi, tetapi juga mencegah potensi ancaman sejak dini. Kedua, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan responsif, sehingga kehadiran polisi benar-benar dirasakan sebagai pelindung

yang dekat dengan masyarakat. Ketiga, membangun kemitraan dengan masyarakat sebagai bentuk penguatan *community policing* Keempat, menegakkan hukum dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas, yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kelima, mengedepankan semangat *Presisi* (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) sebagai nilai dasar dalam setiap langkah, sehingga program patroli bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya terukur, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Tabel 1. 2 Kriminalitas di Kabupaten Bandung tahun 2023 - 2024

Tahun	CT (Crime Total)	Jenis Kejahatan Tertinggi	Lokasi Kejadian Tertinggi	Waktu Kejadian Tertinggi	Jumlah Kejahatan Tingkat Polsek tertinggi di wilayah kab.Bandung
2023	3.571	Pencurian, Penganiayaan, Pengeroyokan	Rumah, Jalanan	18.00-21.59	Polsek Baleendah
2024	2.269		Umum		Polsek Soreang

Sumber : Pusiknas.polri.go.id.

(Diolah Oleh Peneliti 2025)

Namun berdasarkan data kriminalitas di Kabupaten Bandung, tercatat pada tahun 2023 sebanyak 3.571 Crime Total (CT) dengan jenis kejahatan tertinggi berupa pencurian dengan pemberatan, penganiayaan, dan pengeroyokan yang dominan terjadi di rumah serta jalanan umum pada rentang waktu 18.00–21.59, dengan penyumbang terbanyak berasal dari Polsek Baleendah; sementara itu, pada tahun 2024 angka kriminalitas menurun menjadi 2.269 CT, namun jenis kejahatan tertinggi tetap sama dan kasus penganiayaan tercatat mencapai 391 kasus yang masih didominasi terjadi di jalanan umum pada waktu malam hari, bahkan terdapat pergeseran wilayah penyumbang tertinggi dari Polsek Baleendah ke Polsek Soreang yang berada dalam satu kawasan dengan Polresta Bandung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif kriminalitas menurun, secara kualitatif permasalahan keamanan publik masih signifikan, khususnya terkait kejahatan kekerasan yang marak di ruang publik pada malam hari. Hal ini menunjukan program patroli Tim Sijalak Presisi belum

sepenuhnya tercapai karena masih terdapat ketimpangan antara penurunan angka kriminalitas dan kestabilan keamanan di tingkat lokal.

Tabel 1. 3 Data Jumlah Anggota Tim Sijalak Presisi

PANGKAT	JUMLAH
KOMPOL	1
IPDA	1
BRIPDA	40

Sumber : Polresta Bandung

(Data Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa jumlah personel Tim Sijalak Presisi Kabupaten Bandung masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah hukum yang harus diawasi. Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada patroli rutin yang belum mampu menjangkau seluruh titik rawan secara merata. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan pengamanan di lapangan dengan jumlah aparat yang tersedia, terlebih Kabupaten Bandung memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dan potensi kerawanan yang beragam, mulai dari kejahatan jalanan, perkelahian, dan berbagai tindakan kriminal lainnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program patroli Sijalak masih menghadapi kendala dalam menjangkau seluruh titik rawan kejahatan secara merata akibat keterbatasan personel dan sarana operasional yang tersedia. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian Hasibuan (2016) mengenai Efektivitas Patroli Terpadu dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Studi Polres Bungo) yang menyatakan bahwa pelaksanaan patroli memang telah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia (jumlah dan kualitas), minimnya sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan patroli. Selain itu hasil penelitian lain menemukan bahwa pelaksanaan patroli oleh kepolisian dinilai cukup efektif dalam menekan angka kriminalitas karena berbasis pada pemetaan wilayah rawan dan waktu kejadian tindak pidana. Namun demikian, optimalisasi program patroli masih terkendala oleh keterbatasan jumlah personel, sarana

operasional yang belum memadai, serta perlunya peningkatan kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat (Pratama, 2023)

Tabel 1. 4 Data Jumlah Kendaraan Tim sijalak Presisi

JUMLAH R2	REGU
5	1
5	2
5	3

Sumber : Polresta Bandung

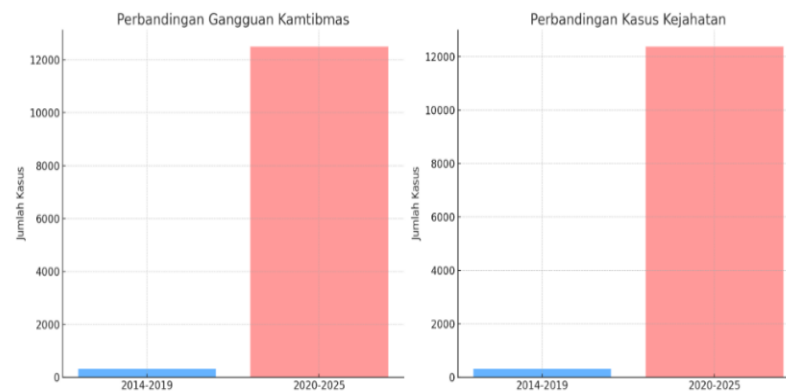
(Data Diolah Peneliti, 2025)

Jika dilihat dari Tabel 1.2 di atas, dapat diketahui jumlah kendaraan roda dua (R2) yang digunakan oleh Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung pada tahun 2025. Regu 1 memiliki sebanyak 5 unit kendaraan R2, kemudian Regu 2 juga memiliki 5 unit kendaraan R2, dan Regu 3 memperoleh jumlah yang sama yaitu 5 unit kendaraan R2. Dengan demikian, total keseluruhan kendaraan roda dua yang dioperasikan oleh Tim Sijalak Presisi mencapai 15 unit kendaraan. Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa distribusi kendaraan pada masing-masing regu relatif merata, yaitu setiap regu memperoleh jumlah kendaraan yang sama sehingga mendukung pelaksanaan patroli secara proporsional di wilayah hukum Kabupaten Bandung. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam melalui observasi awal, jumlah kendaraan yang tersedia masih dapat dikatakan terbatas bila dibandingkan dengan cakupan wilayah patroli yang luas serta kompleksitas titik rawan kriminalitas di Kabupaten Bandung.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan penguatan sarana operasional agar pelaksanaan patroli rutin dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah rawan secara optimal. Hal berkaitan erat dengan input, yang menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi atau program. Dalam pelaksanaan patroli Tim Sijalak Presisi, sarana operasional seperti kendaraan patroli merupakan bagian dari input utama yang menentukan efektivitas kegiatan di lapangan. Keterbatasan jumlah kendaraan menunjukkan bahwa aspek input belum sepenuhnya mendukung proses pelaksanaan patroli, terutama mengingat luasnya

cakupan wilayah dan banyaknya titik rawan kejahatan di Kabupaten Bandung. Dengan kata lain, meskipun strategi dan personel telah disiapkan dengan baik, efektivitas program akan tetap terhambat apabila komponen input khususnya sarana operasional tidak memadai.

Gambar 1. 3 laporan gangguan KAMTIBMAS 01 januari 2020 s/d 01 oktober 2025



Sumber : Polresta Bandung
(Data Diolah Peneliti, 2025)

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada periode 1 Januari 2020 hingga 1 Oktober 2025 mencapai 12.504 kejadian . Angka ini meningkat sangat tajam jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni 1 April 2014 hingga 31 Desember 2019 yang hanya mencatat 318 kejadian . Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 12.186 kejadian atau sekitar 3.832,08% . Jika dikhususkan pada kategori kejahatan , peningkatan juga terlihat signifikan, yaitu naik sebanyak 12.064 kasus atau 3.879,10% dibandingkan periode sebelumnya. Tingginya angka kejahatan ini berdampak pada meningkatnya risiko masyarakat , di mana diperkirakan terdapat 373 orang dari setiap 100.000 penduduk yang berpotensi menjadi korban. Kondisi ini menggambarkan bahwa hasil (output) dari pelaksanaan program belum menunjukkan capaian optimal, karena indikator keberhasilan yakni penurunan angka kriminalitas dan peningkatan rasa aman masyarakat belum terpenuhi secara nyata.

Peningkatan tren kriminalitas membuat isu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Kamtibmas tidak hanya dimaknai sebagai kondisi aman dari tindak pidana, tetapi juga sebagai keadaan sosial yang tertib, terkendali, serta mampu mendukung kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat. Tingginya angka kriminalitas dan gangguan kamtibmas sering kali mencerminkan adanya keterpaduan antara kapasitas keamanan aparat, efektivitas kebijakan publik, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas lingkungan sosialnya.).

Keamanan dan Ketertiban merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan kehidupan sosial. Keamanan dipandang sebagai salah satu fungsi esensial negara yang tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dari ancaman kriminalitas, tetapi juga sebagai prasyarat tercapainya pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Suatu masyarakat yang aman memungkinkan warganya beraktivitas dengan tenang, berinteraksi secara produktif, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, kondisi yang tidak aman dapat menimbulkan rasa cemas, menurunkan kualitas hidup, dan menghambat proses pembangunan. Keadaan ini sejalan dengan teori kebutuhan dasar yang menekankan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan fundamental manusia sebelum mencapai tingkat kebutuhan sosial yang lebih tinggi.

Keamanan dan ketertiban juga dipandang sebagai instrumen untuk menjaga legitimasi pemerintah. Kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan keamanan, berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Bouckaert & Van de Walle (2003). Pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparaturnegara sebagai abdi Masyarakat, pelayanan publik yang diberikan diharapkan dari hari ke hari semakin berkualitas (Mulyadi & dkk 2018). Artinya, semakin efektif lembaga negara dalam menciptakan rasa aman, semakin tinggi pula legitimasi dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi keamanan tidak hanya bersifat represif dalam menangani kejahatan, tetapi juga preventif dalam membangun rasa tenteram.

Gangguan keamanan seringkali tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga menimbulkan efek domino dalam masyarakat. Misalnya, meningkatnya angka kriminalitas dapat menurunkan minat investasi, menghambat mobilitas ekonomi, serta menimbulkan segregasi sosial akibat meningkatnya ketidakpercayaan antarwarga. Dalam situasi seperti ini, peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjadi sangat penting sebagai aktor utama yang diberi mandat oleh konstitusi untuk memelihara pelestarian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas mengatur bahwa Polri berfungsi memelihara keamanan dan menjaga masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan Masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, terdapat urgensi untuk melakukan pendalaman lebih komprehensif mengenai sejauh mana patroli rutin Tim Sijalak Presisi Kabupaten Bandung mampu mencapai tujuannya dalam menekan tindak kriminal. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas patroli Sijalak Presisi Polresta Bandung. Atas dasar itu, peneliti menetapkan judul **“Efektivitas Program Patroli Rutin Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kontradiksi antara pelaksanaan patroli rutin Tim Sijalak Presisi yang dilakukan pada malam hari dengan fakta bahwa waktu tersebut justru masih menjadi jam rawan terjadinya tindak kejahatan.
2. Meskipun angka kriminalitas di Kabupaten Bandung secara kuantitatif mengalami penurunan, Namun terdapat pergeseran wilayah dengan tingkat kriminalitas tertinggi dari Polsek Baleendah ke Polsek Soreang, yang secara administratif berada dalam wilayah hukum terdekat dengan Polresta Bandung.
3. Keterbatasan jumlah personel Tim Sijalak Presisi dan armada yang dimiliki membuat jangkauan patroli tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung yang sangat luas.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *input* patroli rutin Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung?
2. Bagaimana proses Produksi rutin Tim Sijalak Polresta Bandung?
3. Bagaimana *output* patroli rutin Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung?
4. Bagaimana produktivitas patroli rutin Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Mengetahui *input* patroli rutin Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung.
2. Mengetahui proses Produksi rutin Tim Sijalak Polresta Bandung.
3. Mengetahui *output* patroli rutin Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung.
4. Mengetahui produktivitas patroli rutin Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini tidak hanya berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di ranah Administrasi Publik , khususnya pada kajian implementasi kebijakan publik dan efektivitas pelayanan publik di bidang keamanan, tetapi juga memberikan masukan nyata bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, serta peneliti lain yang memiliki kepentingan pada isu keamanan dan pelayanan publik.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur di bidang Administrasi Publik , khususnya dalam kajian penerapan kebijakan keamanan publik berbasis pelayanan langsung kepada masyarakat. Penelitian ini dapat menampilkan bagaimana efektivitas suatu program kepolisian, dalam hal ini Tim Sijalak Presisi , dapat diukur melalui indikator administrasi publik seperti efektivitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang ingin

menganalisis program keamanan berbasis partisipasi masyarakat atau mengkaji perbandingan efektivitas model patroli rutin di berbagai wilayah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Aparat Kepolisian (Polresta Bandung dan Tim Sijalak Presisi)
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang tujuan terkait sejauh mana pelaksanaan patroli rutin berjalan sesuai dengan tujuan program, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat, efektivitas strategi patroli, hingga pola komunikasi yang terjaga dengan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar perbaikan manajerial serta inovasi program patroli di masa depan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan daerah di bidang keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung pembangunan daerah. Dengan adanya data empiris dari penelitian ini, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif, berbasis bukti, serta relevan dengan kebutuhan langsung masyarakat di lapangan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan bersama aparat kepolisian. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang program Tim Sijalak Presisi, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi, melaporkan tindak kriminalitas, serta membangun kepercayaan dan kerja sama yang harmonis dengan aparat keamanan. Pada akhirnya, masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung berupa terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman untuk beraktivitas.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis maupun dasar bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji isu serupa, baik dalam cakupan yang sama maupun berbeda. Hasil penelitian ini dapat membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang lebih komparatif, misalnya membandingkan efektivitas Tim Sijalak Presisi dengan program patroli rutin lainnya di kota/kabupaten lain.

F. Kerangka Berpikir

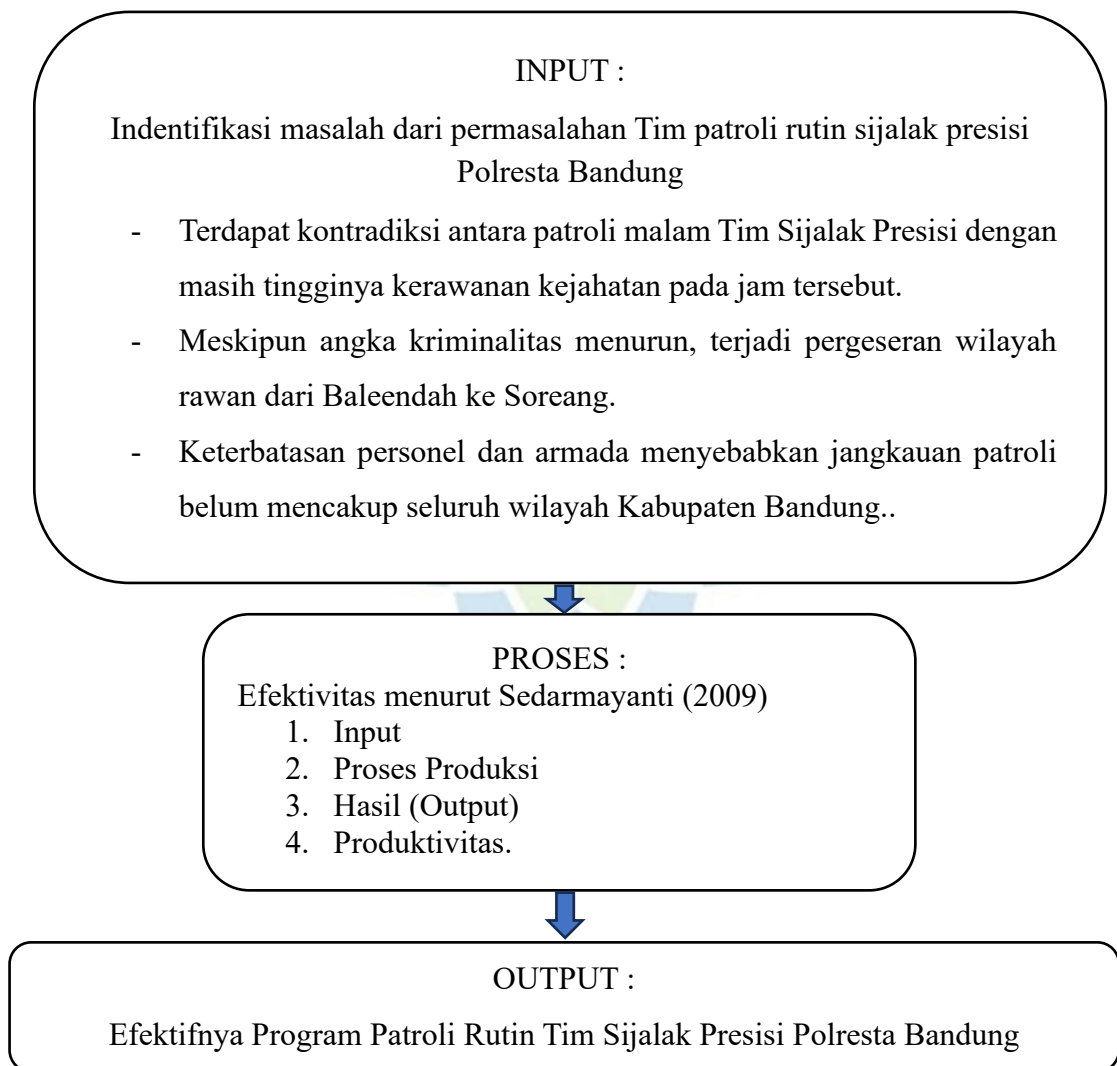
Polresta Bandung membentuk Tim Sijalak Presisi sebagai program patroli rutin yang bertujuan mencegah tindak kriminalitas, menjaga situasi kamtibmas, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung. Program ini menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan keamanan publik yang dilakukan melalui patroli mobile, respons cepat terhadap gangguan keamanan, serta kehadiran polisi pada jam dan lokasi rawan kejahatan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu adanya kontradiksi antara waktu patroli rutin yang dilaksanakan pada malam hari dengan fakta bahwa jam tersebut masih merupakan waktu rawan terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, meskipun angka kriminalitas secara kuantitatif menunjukkan penurunan, masih terjadi pergeseran wilayah rawan kejahatan di beberapa titik tertentu. Permasalahan lain juga dapat dilihat dari kebutuhan koordinasi lintas wilayah, keterbatasan personel dan sarana pendukung, serta perlunya peningkatan responsivitas terhadap laporan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program patroli masih perlu dikaji secara mendalam.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Program Patroli Rutin Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung, maka peneliti menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Sedarmayanti (2009). Teori ini digunakan untuk menganalisis keberhasilan program melalui beberapa dimensi utama, yaitu Input, Proses Produksi, Hasil (Output), dan Produktivitas.

Melalui penggunaan teori tersebut, diharapkan dapat diketahui apakah Program Patroli Rutin Tim Sijalak Presisi Polresta Bandung telah berjalan secara efektif atau masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, alur kerangka berpikir penelitian ini digambarkan pada bagan kerangka berpikir.

Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir Penelitian



(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2026)